

SKRIPSI
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKECUALIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:



SYAZA RIZKIA PUTRI
2210112124

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing:

Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.
Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LL.M.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 12/PK-V/III/2026

**LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 12/PK-V/III/2026**

**PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

***HEALTH SERVICES EXCLUDED BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 59 OF
2024 CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER
82 OF 2018 ON HEALTH INSURANCE***

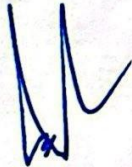
**Disusun Oleh:
Author:**

**Syaza Rizkia Putri
2210112124**

**Program Kekhususan (PK): Hukum Tata Negara (PK V)
Concentration Program (CP): Constitutional Law (CP V)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
24 Juni 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on Juni 24th, 2026 and
Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

**Dekan
Dean**



**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001**

**Wakil Dekan I
Vice Dean I**



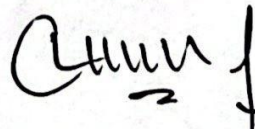
**Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002**

**Pembimbing I
Supervisor I**



**Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.
NIP. 198205092005012002**

**Pembimbing II
Supervisor II**



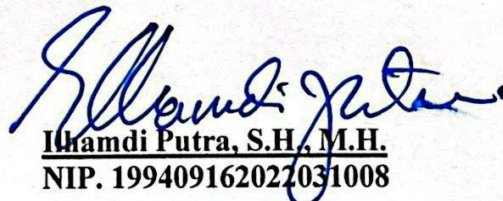
**Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LL.M.
NIP. 198303312015041001**

**Penguji I
Examiner I**



**Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H.
NIP. 198008282015041002**

**Penguji II
Examiner II**



**Ikhamdi Putra, S.H., M.H.
NIP. 199409162022031008**

	No. Alumni Universitas		Syaza Rizkia Putri		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang/ 19 Mei 2004	f. Tanggal Lulus	: 24 Juni 2026	
	b. Nama Orangtua	: Abdul Razak Yuli Widriani	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 10 Bulan	
	d. PK	: Hukum Tata Negara	i. IPK	: 3,73	
	e. No. BP	: 2210112124	j. Alamat	: Khatib, Padang	

**PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN**

(Syaza Rizkia Putri, 2210112124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2026)

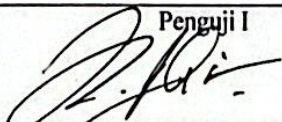
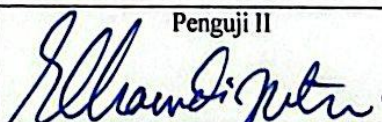
ABSTRAK

Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur mengenai pengecualian layanan kesehatan terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum karena Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penelitian ini akan menjawab pertama, bagaimana sinkronisasi hukum antara pengecualian pelayanan kesehatan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 dengan asas perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, bagaimana pengecualian pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf r dilihat dari prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengecualian layanan kesehatan terhadap korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tidak sinkron dengan asas perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 karena negara tidak boleh membiarkan korban menanggung sendiri kerugiannya. Kedua, jika dilihat dari prinsip hak asasi manusia, ketentuan mengenai pengecualian pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf r dinilai bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip keadilan. Prinsip keadilan juga harus tercermin dalam memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan tepat waktu kepada seluruh peserta tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, disarankan perlunya harmonisasi kebijakan melalui pengintegrasian pembiayaan layanan kesehatan korban tindak pidana ke dalam sistem BPJS, sehingga anggaran LPSK yang selama ini digunakan untuk kebutuhan kesehatan dapat dioptimalkan untuk pelaksanaan fungsi perlindungan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, Pengecualian Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Korban Tindak Pidana.

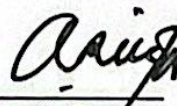
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 24 Juni 2026.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Syaza Rizkia Putri	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang / May 19 th 2004 b. Parents' Name : Abdul Razak Yuli Widriani c. Faculty : Law d. Concentration : Constitutional Law e. Student ID : 2210112124	f. Graduation Date : June 24 th , 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 10 months i. GPA : 3,73 j. Address : Khatib, Padang	

HEALTH SERVICES EXCLUDED BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 59 OF 2024 CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 82 OF 2018 ON HEALTH INSURANCE

(Syaza Rizkia Putri, 2110112124, Faculty of Law, Andalas University, 83 Pages, 2026)

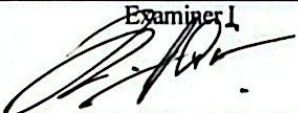
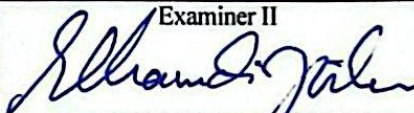
ABSTRACT

Article 52 paragraph (1) letter r of Presidential Regulation Number 59 of 2024 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 on Health Insurance, which regulates the exemption of health services for victims of assault, sexual violence, terrorism, and human trafficking. This could cause legal issues because Presidential Regulation Number 59 of 2024 is not aligned with higher laws, and aims to examine its legal synchronization with the principles of victim protection and human rights. This study will answer first, how the legal synchronization between the exemption of health services in Presidential Regulation Number 59 of 2024 aligns with the principles of victim protection in Law Number 31 of 2014 on the Amendment of Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Second, how the exemption of health services based on Article 52 paragraph (1) letter r is viewed from the perspective of human rights principles. Furthermore, this research is a normative juridical legal study with a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The results of the study show that first, the exemption of health services for victims of criminal acts as regulated in Presidential Regulation Number 59 of 2024 is not in line with the principle of victim protection in Law Number 31 of 2014 because the state should not let the victims bear their losses alone. Second, from the perspective of human rights principles, the provision regarding the exemption of health services based on Article 52 paragraph (1) letter r is considered to contradict the principles of non-discrimination and justice. The principle of justice must also be reflected in providing health services fairly, evenly, and in a timely manner to all participants without discrimination. Therefore, it is recommended to harmonize policies by integrating the financing of healthcare services for victims of criminal acts into the BPJS system, so that the LPSK budget, which has so far been used for health needs, can be optimized for the implementation of victim protection and recovery functions.

Keywords: Presidential Regulation, Health Service Exceptions, Protection for Victims of Criminal Acts.

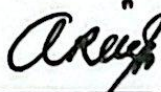
This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by June 24th, 2026.

Examiner,

Signature		
Name	Dr. Muhammad Irham, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Arfiani, S.H., M.H.


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: